

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas Rahmat-Nya penyusunan dan penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik dan telah disusun menjadi sebuah dokumen..

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara, menyediakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara..

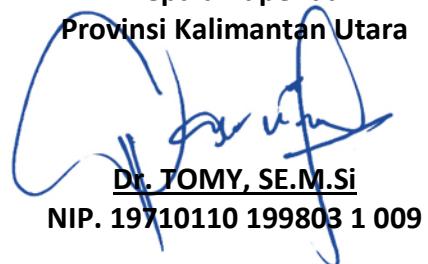
Renstra Badan Pendapatan Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta pendanaan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun kedepan..

RENSTRA disusun untuk memenuhi arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang difokuskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2021-2026, yakni “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Berubah, Maju dan Sejahtera”

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor , Nopember 2023

**Kepala Bapenda
Provinsi Kalimantan Utara**



Dr. TOMY, SE.M.Si
NIP. 19710110 199803 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	ii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah	43
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
4.3 Strategi dan Kebijakan	44

BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	80
BAB VIII	PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	ii
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	ii
Tabel T-C. 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	ii
Tabel T-C. 26	Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan	ii
Tabel T-C. 27	Rencana Program, Kegiatan dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	ii
Tabel T-C. 28	PENDAHULUAN	ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan serta memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum.

Dari sisi keuangan daerah untuk mewujudkan kemandirian Pemerintah Daerah dalam pendanaan pelaksanaan pembangunan perlu upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya seperti pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara matematik rasio ideal apabila semakin besar porsi PAD dibanding dengan dana perimbangan maka semakin layak daerah tersebut sebagai daerah yang otonom dan mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah harus berupaya menggerakkan segenap kemampuan manajerial pengelolaan pendapatan daerah melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan ekonomi masyarakat secara profitable, akuntabel dan transparan.

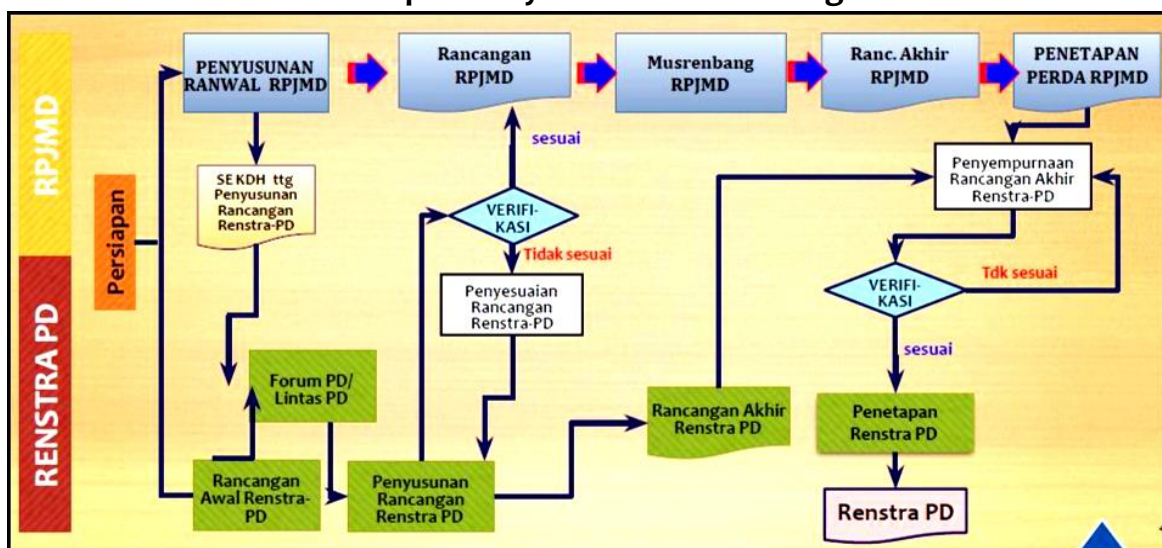
Perencanaan Strategis adalah (1) memuat keputusan untuk waktu yang akan datang (2) merupakan proses (3) sebagai filosofi organisasi dan (4) terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur dengan baik.

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur Terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait dengan penggalian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dikategorikan ke dalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bersinergi dan mengarah pada satu visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara,

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni: (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir, (6) Penetapan Renstra

Gambar I.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dengan RENSTRA



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 18)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara di bidang pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai pedoman atau acun dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2022-2026;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang yang ada di Bapenda;
6. Sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan Bapenda Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang (i) Latar Belakang, (ii) Landasan Hukum, (iii) Maksud dan Tujuan serta (iv) Sistematika Penulisan Renstra Bapenda Provinsi Kalimantan Utara

Bab II Gambaran Pelayanan Bapenda, Menjelaskan tentang (i) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, (ii) Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, (iii) Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, (iv) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, membahas tentang (i) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, (ii) Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, (iii) Telaahan Renstra Menteri Keuangan Republik Indonesia, (iv) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis, (v) Penentuan Isu-Isu Strategis;

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, menjelaskan tentang (i) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Bab V Strategi dan Kebijakan, menjelaskan tentang (i) strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Bab V Strategis dan Kebijakan, menjelaskan tentang (i) Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra 2022-2026;

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat indikator kinerja yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah selama 5 Tahun periode Renstra 2022-2026;

Bab VIII P e n u t u p

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai dasar pembentukan Organisasi dan Struktur Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak tertentu daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan dengan fungsi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Pendapatan Daerah serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 nomor 18). adalah melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan
- 3) Dana Perimbangan
- 4) Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan

b. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perecanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- 3) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- 4) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan;
- 5) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 6) Pelaksanaan Unit Pelaksanan Teknis;
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewenangan melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah.

c. Uraian Tugas dan Fungsi

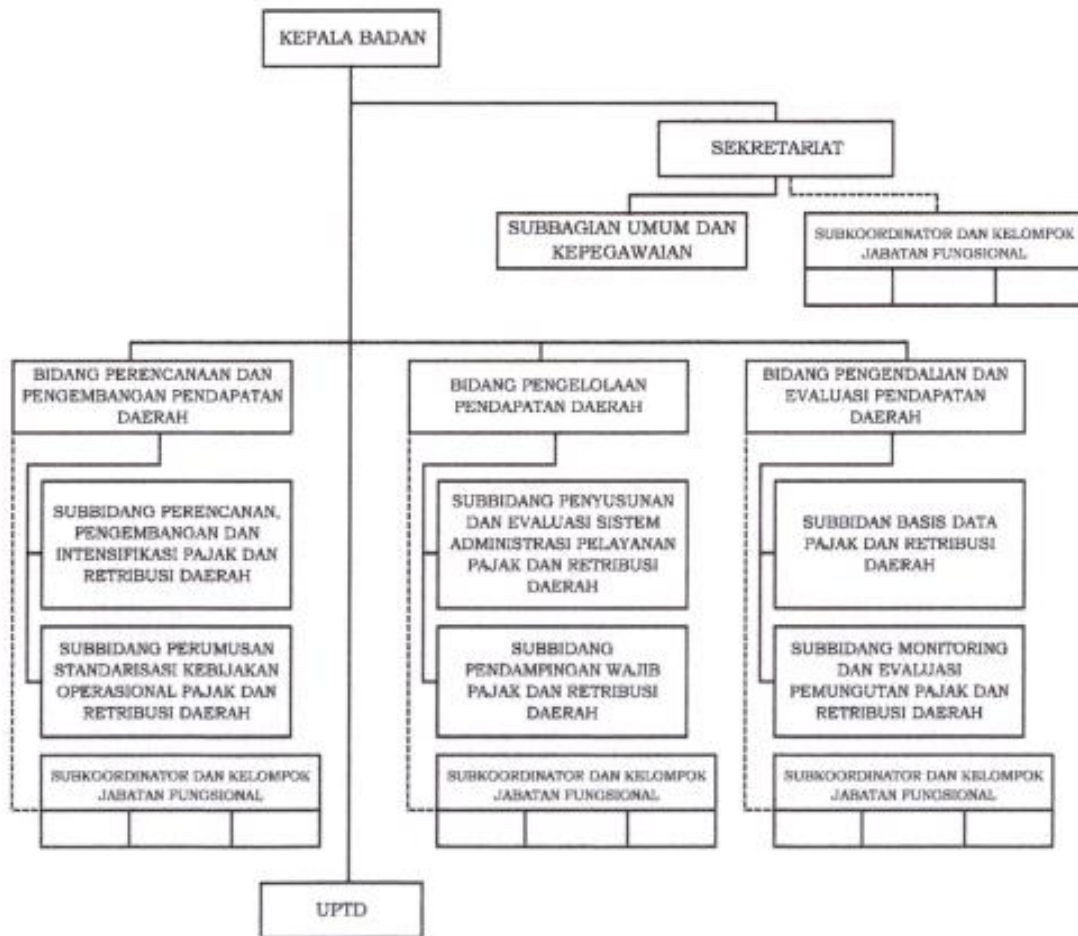
Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2022 nomor 18), maka susunan organisasi Bapenda Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a) Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b) Subbidang Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a) Subbidang Penysusunan dan Evaluasi Sistem Administrasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b) Subbidang Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a) Subbidang Basis Data Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6) Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Tanjung Selor;
- 7) Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Tarakan;
- 8) Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Malinau;
- 9) Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Nunukan;
- 10) Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Tidung Pale;

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



Sumber Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022

Gambar 2.2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD BAPENDA
Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesional sangat terkait dengan kompetensi ASN yang didalamnya terdapat tingkatan penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh pejabat yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme kalangan ASN memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan ASN yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier ASN, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tercatat sampai dengan bulan april 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.

**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2020**

No.	INSTANSI	ESELON				GOLONGAN			
		II	III	IV	Staf	I	II	III	IV
1	BAPENDA	1	3	9	17	-	7	15	8
2	UPTD Tarakan	-	1	3	18	1	12	10	1
3	UPTD Bulungan	-	-	3	10	1	6	5	1
4	UPTD Nunukan	-	1	3	11	-	6	8	-
5	UPTD Malinau	-	1	3	6	-	3	5	2
6	UPTD Tana Tidung	-	1	3	3	-	2	4	1
	Jumlah	1	8	24	65	2	36	47	13

Sumber Data : Kepegawaian BAPENDA Provinsi Kaltara 2020

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah	Presentase	
		Laki-laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan
1	BAPENDA	17	14	31	54,83	45,17
2	UPTD Tarakan	12	10	22	54,54	45,45
3	UPTD Bulungan	11	2	13	84,61	15,38
4	UPTD Nunukan	12	3	15	80,00	20,00
5	UPTD Malinau	5	5	10	50,00	50,00
6	UPTD KTT	5	2	7	71,42	29,38
	Jumlah	62	36	98	65,90	34,10

Sumber: Kepegawaian BAPENDA Provinsi Kaltara 2020

Data pada Table 2.3 diatas menunjukkan bahwa presentase pegawai laki-laki lebih besar dari pada presentase pegawai perempuan yaitu 43,10% pegawai laki-laki dan 65,90% pegawai perempuan. Walaupun sudah diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki pada saat seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) namun jumlah perempuan yang jadi PNS tetap lebih kecil dari laki-laki hal ini dapat terjadi karena adanya kecendrungan kaum perempuan setelah berkeluarga lebih memilih mengurus anak dan rumah tangga.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja (PNS) BAPENDA dan UPTD di Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen pegawai tidak tetap yang jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Pegawai Honorer/PTT BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020

No.	INSTANSI	PENDIDIKAN								Jumlah
		S2	S1	DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	
1	BAPENDA		4	-	-	1	6	-	-	11
2	UPTD Tarakan	1	4	-	-	-	6	1	1	13
3	UPTD Bulungan	-	4	-	4	-	12	-	1	21
4	UPTD Nunukan	-	4	-	1	-	8	1	0	14
5	UPTD Malinau	-	2	-	-	-	6	-	2	10
6	UPTD TanaTidung	-	5	-	-	-	7	1	1	14
	Jumlah	1	23	-	5	1	45	3	5	83
	Persentase	1.20	27.71	-	6.02	1.20	54.21	3.61	6.02	100

Sumber Data: Kepegawaian BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara 2020

Data Table 2.4 diatas menunjukkan bahwa pegawai tidak tetap yang direkrut oleh BAPENDA dan UPTD Kabupaten/Kota masih didominasi oleh tenaga yang tingkat pendidikannya SLTA kebawah yaitu 63.84%, sedangkan yang tingkat pendidikannya diatas SLTA hanya 36.13%.

Sehubungan hal ini Luthan (1993 : 10) mengatakan, sumber daya utama organisasi bukanlah teknologi atau barang dan modal tetapi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia atau aparat merupakan kunci yang menentukan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah pegawai BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara saat ini mencapai 167 orang yang terdiri dari 98 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 69 orang Pegawai Tidak Tetap. Dari 98 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 orang yang menduduki Jabatan Eselon III dan 22 orang menduduki Jabatan Eselon IV dilingkungan BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara.

Selain pendidikan formal masih ada sarana pendidikan lain untuk mendukung pengembangan kualitas dan wawasan berpikir aparat. Sarana pendidikan ini adalah pendidikan kursus dan pendidikan penjenjangan.

Pendidikan kursus dan penjenjangan yang sekarang disebut pendidikan latihan kepemimpinan (Latpim) menjadi sangat penting bagi Pegawai Negeri Sipil, karena tujuan pendidikan ini pada hakekatnya tidak hanya meningkatkan kualitas, wawasan, dan keterampilan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan keseragaman kerja diseluruh jajaran Departemen dan Pemerintah Daerah, sebab sebagai organisasi publik, pendidikan pelatihan semacam ini sangat dibutuhkan dalam rangka megoptimalkan pelaksanaan tugas. Itulah sebabnya baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1994 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang kebijakan Diklat PNS, mensyaratkan bahwa PNS yang akan menduduki Jabatan Struktural hendaknya mengikuti Diklat Pendidikan Penjenjangan atau Latihan kepemimpinan (Latpim). Sedangkan Pelatihan Khusus atau Diklat Teknis Fungsional juga mutlak diperlukan sebagai unsur yang bersifat substansi untuk meningkatkan nilai-nilai profesionalisme dan kompetensi aparat. Pejabat eselon dilingkungan BAPENDA dan UPTD Kabupaten/Kota semuanya sudah mengikuti Diklat PIM seperti yang terlihat pada tabel.2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Keadaan Pegawai BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara
menurut Diklat Penjenjangan yang Telah Diikuti

No	Jenis Pendidikan Penjenjangan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	LATPIM IV	22	100
2	LATPIM III	8	100
3	LATPIM II	1	100

Sumber Data : Kepegawaian BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai seperti gedung kantor, kendaraan, komputer, alat-alat perlengkapan kerja dan alat perlengkapan kantor mutlak diperlukan untuk pendukung penyelenggaraan tugas BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparat sangat dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan sarana dan prasarana di atas. Kondisi sarana dan prasarana BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara disajikan dalam tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor		
	a. Kantor Badan	1 unit	Baik
	b. 5 UPTD	4 unit	UPTD KTT masih sewa
2	Rumah Dinas Jabatan		
	a. Kantor Badan	0 unit	Belum ada
	b. 5 UPTD	4 unit	UPTD KTT masih sewa
	Alat – Alat Angkutan		
	a. Kendaraan Ruda 2	59 unit	Baik
	b. Kendaraan roda 4	23 unit	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	a. Laptop	41 unit	Baik
	b. Mesin Ketik Manual 14-16 in	12 unit	Baik
	c. Papan Nama Instansi	3 unit	Baik
	d. Papan Pengumuman	1 unit	Baik
	e. Mesin Absensi	1 unit	Baik
	f. Rak Kayu	8 unit	Baik
	g. Filling Basi/Metal	44 unit	Baik
	h. Brand Kas	9 unit	Baik
	i. Lemari Makan	1 unit	Baik
	j. Lemari Kaca	10 unit	Baik
	k. Alat Penghancur Kertas	3 unit	Baik
	l. Lemari Kayu	25 unit	Baik

m. Sofa	6 unit	Baik
n. Lemari Es	7 unit	Baik
o. Printer	97 unit	Baik
p. Meja Kerja Eselon II	1 unit	Baik
q. Meja Kerja Eselon III	15 unit	Baik
r. Meja Kerja Eselon IV	18 unit	Baik
s. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6 unit	Baik
t. Kursi Kerja	59 unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 5, terdapat 3 komponen penerimaan daerah, yaitu : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2. Dana Perimbangan, 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama 2 tahun sejak dibentuknya OPD ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Perangkat Daerah dapat digambarkan pada table dibawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke -		Realisasi Capaian Tahun ke -		Rasio Capaian pada Tahun ke -	
		3	4	3	4	3	4
1	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	104,81 %	100 %	101,09 %	104,81 %	101,09 %
2.	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	19 %	25,91 %	20 %	24,27 %	136.36 %	121,35 %
3.	Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	30 %	3,18%	45 %	43,61 %	10,60 %	96,91 %



Target dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah
2019 – 2020

DAFTAR TARGET & REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
S/D 31 DESEMBER 2019

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI		%	TARGET TAHUN 2020	REALISASI		%
				Desember	SELISIH LBH/(KURANG)			Desember	SELISIH LBH/(KURANG)	
1	2	3	4	7	8	9	4	7	8	9
4		PENDAPATAN	2.633.076.372.843,99	2.615.420.980.053,82	(17.655.392.790,17)	99,33%	2.458.371.176.543,15	2.378.441.957.730,47	(79.929.218.812,68)	96,75%
4.1		A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	625.676.715.002,99	664.780.420.952,82	39.103.705.949,83	106,25%	582.164.406.571,15	588.519.430.029,47	6.355.023.458,32	101,09%
4.1.1		I. Pendapatan Pajak Daerah	400.039.235.615,00	417.536.961.744,00	17.497.726.129,00	104,37%	411.749.287.330,71	348.949.836.778,00	(62.799.450.552,71)	84,75%
4.1.1.01		Pajak Kendaraan Bermotor	78.720.000.000,00	77.595.520.635,00	(1.124.479.365,00)	98,57%	85.000.000.000,00	74.007.757.312,00	(10.992.242.688,00)	87,07%
4.1.1.03		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	86.880.100.000,00	96.259.463.507,00	9.379.363.507,00	110,80%	80.000.000.000,00	73.824.923.094,00	(6.175.076.906,00)	92,28%
4.1.1.05		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	195.000.000.000,00	204.339.148.746,00	9.339.148.746,00	104,79%	205.249.287.330,71	151.370.797.485,00	(53.878.489.845,71)	73,75%
4.1.1.06		Pajak Air Permukaan	1.500.000.000,00	1.653.433.575,00	153.433.575,00	110,23%	3.000.000.000,00	2.352.200.180,00	(647.799.820,00)	78,41%
4.1.1.07		Pajak Rokok	37.939.135.615,00	37.689.395.281,00	(249.740.334,00)	99,34%	38.500.000.000,00	47.394.158.707,00	8.894.158.707,00	123,10%
		JUMLAH I	400.039.235.615,00	417.536.961.744,00	17.497.726.129,00	104,37%	411.749.287.330,71	348.949.836.778,00	(62.799.450.552,71)	84,75%
4.1.2		II. Hasil Retribusi Daerah	20.310.000.000,00	5.853.793.057,00	(14.456.206.943,00)	28,82%	5.065.000.000,00	4.856.242.203,00	(208.757.797,00)	95,88%
4.1.2.02		Retribusi Jasa Usaha	20.310.000.000,00	5.853.793.057,00	(14.456.206.943,00)	28,82%	4.815.000.000,00	4.560.447.003,00	(254.552.997,00)	94,71%
4.1.2.02.01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.210.000.000,00	455.652.910,00	(9.754.347.090,00)	4,46%	185.000.000,00	342.534.940,00	157.534.940,00	185,15%
4.1.2.02.20		Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	10.000.000.000,00	5.160.939.647,00	(4.839.060.353,00)	51,61%	4.400.000.000,00	4.136.545.563,00	(263.454.437,00)	94,01%
4.1.2.02.22		Retribusi Tempat Parawisata	-	102.799.000,00	102.799.000,00	-	50.000.000,00	57.855.000,00	7.855.000,00	-
4.1.2.02.31		Retribusi Pemanfaatan Perlengkapan Lainnya	-	32.557.500,00	32.557.500,00	-	180.000.000,00	23.511.500,00	(156.488.500,00)	-
		Retribusi Perizinan Tertentu					250.000.000,00	295.795.200,00	45.795.200,00	-
4.1.2.03.11		Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA	100.000.000,00	101.844.000,00	1.844.000,00	101,84%	250.000.000,00	295.795.200,00	45.795.200,00	118,32%
		JUMLAH II	20.310.000.000,00	5.853.793.057,00	(14.456.206.943,00)	28,82%	5.065.000.000,00	4.856.242.203,00	(208.757.797,00)	95,88%
4.1.3		III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.428.544.713,99	11.428.544.713,99	-	100,00%	7.455.831.909,73	7.455.831.909,73	-	100,00%
4.1.3.01		Bagian Laba atas Pernyataan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	11.428.544.713,99	11.428.544.713,99	-	-	7.455.831.909,73	7.455.831.909,73	-	-
4.1.3.01.01		1Bagian Laba atas Pernyataan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	11.428.544.713,99	11.428.544.713,99	-	100,00%	7.455.831.909,73	7.455.831.909,73	-	100,00%
		JUMLAH III	11.428.544.713,99	11.428.544.713,99	-	100,00%	7.455.831.909,73	7.455.831.909,73	-	100,00%



DAFTAR TARGET & REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA S/D 31 DESEMBER 2019

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI		%	TARGET TAHUN 2020	REALISASI		%
				Desember	SELISIH LBH/(KURANG)			Desember	SELISIH LBH/(KURANG)	
1	2	3	4	7	8	9	4	7	8	9
4.1.4		III. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	193.898.934.674,00	229.961.121.437,83	36.062.186.763,83	118,60%	157.894.287.330,71	227.257.519.138,74	69.363.231.808,03	143,93%
4.1.4.02		Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	1.360.037.361,20	(1.139.962.638,80)	54,40%	1.400.000.000,00	1.953.034.324,62	553.034.324,62	139,50%
4.1.4.02.01		Jasa Giro Kas Daerah	2.500.000.000,00	1.333.402.580,95	(1.166.597.419,05)	53,34%	1.400.000.000,00	-	-	0,00%
4.1.4.02.04		Jasa Giro Kas SKPD	-	26.634.780,25	26.634.780,25	-	-	-	-	-
4.1.4.03		Penerimaan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	25.363.055.253,19	8.363.055.253,19	149,19%	16.000.000.000,00	15.324.854.611,04	(675.145.388,96)	95,78%
4.1.4.04		Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)	-	13.300.125,00	13.300.125,00	-	-	-	-	-
4.1.4.06		Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	195.732.410,59	195.732.410,59	-	-	498.403.120,98	498.403.120,98	-
4.1.4.07		Pendapatan Denda Pajak	19.820.000.000,00	3.417.411.812,00	(16.402.588.188,00)	17,24%	10.000.000.000,00	1.736.469.140,00	(8.263.530.860,00)	17,36%
4.1.4.07.07		Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	1.404.900,00	1.404.900,00	-	-	-	-	-
4.1.4.07.13		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	8.870.000.000,00	3.201.625.671,00	(5.668.374.329,00)	36,09%	5.000.000.000,00	1.570.751.300,00	(3.429.248.700,00)	31,42%
4.1.4.07.14		Pendapatan Denda BBNKB	8.004.000.000,00	116.698.480,00	(7.887.301.520,00)	1,46%	5.000.000.000,00	114.186.080,00	(4.885.813.920,00)	2,28%
4.1.4.07.15		Pendapatan Denda PKB Alat Berat	-	42.257.260,00	42.257.260,00	-	-	20.819.524,00	20.819.524,00	-
4.1.4.07.15		Pendapatan Denda BBNKB Alat Berat	-	7.493.376,00	7.493.376,00	-	-	-	-	-
4.1.4.07.17		Pendapatan Denda Air Permukaan	2.946.000.000,00	47.932.125,00	(2.898.067.875,00)	1,63%	-	30.712.236,00	30.712.236,00	-
4.1.4.08		Pendapatan Denda Retribusi	4.600.000,00	3.576.200,00	(1.023.800,00)	77,74%	5.000.000,00	1.724.000,00	(3.276.000,00)	34,48%
4.1.4.08.15		Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.600.000,00	3.576.200,00	(1.023.800,00)	77,74%	5.000.000,00	1.724.000,00	(3.276.000,00)	34,48%
4.1.4.08.33		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.10		Pendapatan Dari Pengembalian	-	7.267.924.039,98	7.267.924.039,98	-	2.690.000.000,00	4.514.479.831,94	1.824.479.831,94	167,82%
4.1.4.10		Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-	-	-	-
4.1.4.14		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	0,00%	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	0,00%
4.1.4.16		Pendapatan BLUD	154.549.334.674,00	191.134.902.934,37	36.585.568.260,37	123,67%	127.769.287.330,71	202.960.083.570,63	75.190.796.239,92	158,85%
4.1.4.16.01		Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	154.549.334.674,00	191.134.902.934,37	36.585.568.260,37	123,67%	127.769.287.330,71	202.960.083.570,63	75.190.796.239,92	158,85%
4.1.4.18		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	1.149.181.301,50	1.149.181.301,50	-	-	268.470.539,53	268.470.539,53	-
4.1.4.18.01		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	1.149.181.301,50	1.149.181.301,50	-	-	268.470.539,53	268.470.539,53	-
		JUMLAH III	193.898.934.674,00	229.961.121.437,83	36.062.186.763,83	118,60%	157.894.287.330,71	227.257.519.138,74	69.363.231.808,03	143,93%
4.2		B. DANA PERIMBANGAN	2.007.104.457.841,00	1.915.654.543.930,00	(91.449.913.911,00)	95,44%	1.876.206.769.972,00	1.788.785.787.701,00	(87.420.982.271,00)	95,34%
4.2.1		I. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	443.486.439.841,00	401.447.194.262,00	(42.039.245.579,00)	90,52%	416.212.871.972,00	332.439.609.943,00	(83.773.262.029,00)	79,87%
4.2.1.01		Bagi Hasil Pajak	88.591.420.000,00	87.466.225.869,00	(1.125.194.131,00)	98,73%	106.344.156.509,00	79.431.732.249,00	(26.912.424.260,00)	74,69%
4.2.1.01.01		Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	56.555.091.000,00	63.057.359.612,00	6.502.268.612,00	111,50%	63.533.104.046,00	47.140.635.463,00	(16.392.468.583,00)	74,20%
4.2.1.01.02		Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	20.173.628.000,00	12.104.176.800,00	(8.069.451.200,00)	60,00%	31.645.311.447,00	27.857.628.303,00	(3.787.683.144,00)	88,03%
4.2.1.01.03		Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	6.581.463.000,00	7.402.110.601,00	820.647.601,00	112,47%	5.383.081.147,00	1.920.358.571,00	(3.462.722.576,00)	35,67%
4.2.1.01.04		Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	5.279.840.000,00	4.866.466.413,00	(413.373.587,00)	92,17%	5.667.355.621,00	2.439.237.576,00	(3.228.118.045,00)	43,04%
4.2.1.01.05		Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	1.398.000,00	36.112.443,00	34.714.443,00	2583,15%	115.304.248,00	73.872.336,00	(41.431.912,00)	64,07%
4.2.1.02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	354.895.019.841,00	313.980.968.393,00	(40.914.051.448,00)	88,47%	309.868.715.463,00	253.007.877.694,00	(56.860.837.769,00)	81,65%
4.2.1.02.01		Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	2.281.702.000,00	1.369.021.200,00	(912.680.800,00)	60,00%	7.803.296.495,00	5.526.163.026,00	(2.277.133.469,00)	70,82%
4.2.1.02.02		Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	20.082.039.000,00	12.049.223.400,00	(8.032.815.600,00)	60,00%	21.902.602.822,00	11.578.090.947,00	(10.324.511.875,00)	52,86%
4.2.1.02.03		Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	163.104.199.835,00	158.526.116.187,00	(4.578.083.648,00)	97,19%	99.488.386.449,00	71.936.541.999,00	(27.551.844.450,00)	72,31%
4.2.1.02.04		Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	1.575.216.000,00	1.102.561.211,00	(472.654.789,00)	70,00%	1.582.569.630,00	1.227.469.051,00	(355.100.579,00)	77,56%
4.2.1.02.05		Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	139.827.244.006,00	125.520.415.945,00	(14.306.828.061,00)	89,77%	156.849.210.885,00	144.439.231.470,00	(12.409.979.415,00)	92,09%
4.2.1.02.08		Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	24.889.355.000,00	13.689.145.250,00	(11.200.209.750,00)	55,00%	20.602.505.050,00	16.735.232.840,00	(3.867.272.210,00)	81,23%
4.2.1.02.09		Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	3.135.264.000,00	1.724.395.200,00	(1.410.868.800,00)	55,00%	1.640.144.132,00	1.565.148.361,00	(74.995.771,00)	95,43%
		JUMLAH I	443.486.439.841,00	401.447.194.262,00	(42.039.245.579,00)	90,52%	416.212.871.972,00	332.439.609.943,00	(83.773.262.029,00)	79,87%



DAFTAR TARGET & REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA S/D 31 DESEMBER 2019

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI		%	TARGET TAHUN 2020	REALISASI		%
				Desember	SELISIH LBH(KURANG)			Desember	SELISIH LBH(KURANG)	
1	2	3	4	7	8	9	4	7	8	9
4.1.4		III. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	193.898.934.674,00	229.961.121.437,83	36.062.186.763,83	118,60%	157.894.287.330,71	227.257.519.138,74	69.363.231.808,03	143,93%
4.1.4.02		Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	1.360.037.361,20	(1.139.962.638,80)	54,40%	1.400.000.000,00	1.953.034.324,62	553.034.324,62	139,50%
4.1.4.02.01		Jasa Giro Kas Daerah	2.500.000.000,00	1.333.402.580,95	(1.166.597.419,05)	53,34%	1.400.000.000,00	-	-	0,00%
4.1.4.02.04		Jasa Giro Kas SKPD	-	26.634.780,25	26.634.780,25	-	-	-	-	-
4.1.4.03		Penerimaan Bunga Deposito	17.000.000.000,00	25.363.055.253,19	8.363.055.253,19	149,19%	16.000.000.000,00	15.324.854.611,04	(675.145.388,96)	95,78%
4.1.4.04		Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)	-	13.300.125,00	13.300.125,00	-	-	-	-	-
4.1.4.06		Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	195.732.410,59	195.732.410,59	-	-	498.403.120,98	498.403.120,98	-
4.1.4.07		Pendapatan Denda Pajak	19.820.000.000,00	3.417.411.812,00	(16.402.588.188,00)	17,24%	10.000.000.000,00	1.736.469.140,00	(8.263.530.860,00)	17,36%
4.1.4.07.07		Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	1.404.900,00	1.404.900,00	-	-	-	-	-
4.1.4.07.13		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	8.870.000.000,00	3.201.625.671,00	(5.668.374.329,00)	36,09%	5.000.000.000,00	1.570.751.300,00	(3.429.248.700,00)	31,42%
4.1.4.07.14		Pendapatan Denda BBNKB	8.004.000.000,00	116.698.480,00	(7.887.301.520,00)	1,46%	5.000.000.000,00	114.186.080,00	(4.885.813.920,00)	2,28%
4.1.4.07.15		Pendapatan Denda PKB Alat Berat	-	42.257.260,00	42.257.260,00	-	-	20.819.524,00	20.819.524,00	-
4.1.4.07.15		Pendapatan Denda BBNKB Alat Berat	-	7.493.376,00	7.493.376,00	-	-	-	-	-
4.1.4.07.17		Pendapatan Denda Air Permukaan	2.946.000.000,00	47.932.125,00	(2.898.067.875,00)	1,63%	-	30.712.236,00	30.712.236,00	-
4.1.4.08		Pendapatan Denda Retribusi	4.600.000,00	3.576.200,00	(1.023.800,00)	77,74%	5.000.000,00	1.724.000,00	(3.276.000,00)	34,48%
4.1.4.08.15		Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.600.000,00	3.576.200,00	(1.023.800,00)	77,74%	5.000.000,00	1.724.000,00	(3.276.000,00)	34,48%
4.1.4.08.33		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.10		Pendapatan Dari Pengembalian	-	7.267.924.039,98	7.267.924.039,98	-	2.690.000.000,00	4.514.479.831,94	1.824.479.831,94	167,82%
4.1.4.10		Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-	-	-	-
4.1.4.14		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	0,00%	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	0,00%
4.1.4.16		Pendapatan BLUD	154.549.334.674,00	191.134.902.934,37	36.585.568.260,37	123,67%	127.769.287.330,71	202.960.083.570,63	75.190.796.239,92	158,85%
4.1.4.16.01		Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	154.549.334.674,00	191.134.902.934,37	36.585.568.260,37	123,67%	127.769.287.330,71	202.960.083.570,63	75.190.796.239,92	158,85%
4.1.4.18		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	1.149.181.301,50	1.149.181.301,50	-	-	268.470.539,53	268.470.539,53	-
4.1.4.18.01		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	1.149.181.301,50	1.149.181.301,50	-	-	268.470.539,53	268.470.539,53	-
		JUMLAH III	193.898.934.674,00	229.961.121.437,83	36.062.186.763,83	118,60%	157.894.287.330,71	227.257.519.138,74	69.363.231.808,03	143,93%
4.2		B. DANA PERIMBANGAN	2.007.104.457.841,00	1.915.654.543.930,00	(91.449.913.911,00)	95,44%	1.876.206.769.972,00	1.788.785.787.701,00	(87.420.982.271,00)	95,34%
4.2.1		I. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	443.486.439.841,00	401.447.194.262,00	(42.039.245.579,00)	90,52%	416.212.871.972,00	332.439.609.943,00	(83.773.262.029,00)	79,87%
4.2.1.01		Bagi Hasil Pajak	88.591.420.000,00	87.466.225.869,00	(1.125.194.131,00)	98,73%	106.344.156.509,00	79.431.732.249,00	(26.912.424.260,00)	74,69%
4.2.1.01.01		Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	56.555.091.000,00	63.057.359.612,00	6.502.268.612,00	111,50%	63.533.104.046,00	47.140.635.463,00	(16.392.468.583,00)	74,20%
4.2.1.01.02		Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	20.173.628.000,00	12.104.176.800,00	(8.069.451.200,00)	60,00%	31.645.311.447,00	27.857.628.303,00	(3.787.683.144,00)	88,03%
4.2.1.01.03		Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	6.581.463.000,00	7.402.110.601,00	820.647.601,00	112,47%	5.383.081.147,00	1.920.358.571,00	(3.462.722.576,00)	35,67%
4.2.1.01.04		Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	5.279.840.000,00	4.866.466.413,00	(413.373.587,00)	92,17%	5.667.355.621,00	2.439.237.576,00	(3.228.118.045,00)	43,04%
4.2.1.01.05		Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	1.398.000,00	36.112.443,00	34.714.443,00	2583,15%	115.304.248,00	73.872.336,00	(41.431.912,00)	64,07%
4.2.1.02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	354.895.019.841,00	313.980.968.393,00	(40.914.051.448,00)	88,47%	309.868.715.463,00	253.007.877.694,00	(56.860.837.769,00)	81,65%
4.2.1.02.01		Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	2.281.702.000,00	1.369.021.200,00	(912.680.800,00)	60,00%	7.803.296.495,00	5.526.163.026,00	(2.277.133.469,00)	70,82%
4.2.1.02.02		Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	20.082.039.000,00	12.049.223.400,00	(8.032.815.600,00)	60,00%	21.902.602.822,00	11.578.090.947,00	(10.324.511.875,00)	52,86%
4.2.1.02.03		Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	163.104.199.835,00	158.526.116.187,00	(4.578.083.648,00)	97,19%	99.488.386.449,00	71.936.541.999,00	(27.551.844.450,00)	72,31%
4.2.1.02.04		Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	1.575.216.000,00	1.102.651.211,00	(472.564.789,00)	70,00%	1.582.569.630,00	1.227.469.051,00	(355.100.579,00)	77,56%
4.2.1.02.05		Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	139.827.244.006,00	125.520.415.945,00	(14.306.828.061,00)	89,77%	156.849.210.885,00	144.439.231.470,00	(12.409.979.415,00)	92,09%
4.2.1.02.08		Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	24.889.355.000,00	13.689.145.250,00	(11.200.209.750,00)	55,00%	20.602.505.050,00	16.735.232.840,00	(3.867.272.210,00)	81,23%
4.2.1.02.09		Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	3.135.264.000,00	1.724.395.200,00	(1.410.868.800,00)	55,00%	1.640.144.132,00	1.565.148.361,00	(74.995.771,00)	95,43%
		JUMLAH I	443.486.439.841,00	401.447.194.262,00	(42.039.245.579,00)	90,52%	416.212.871.972,00	332.439.609.943,00	(83.773.262.029,00)	79,87%



DAFTAR TARGET & REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA S/D 31 DESEMBER 2019

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI		%	TARGET TAHUN 2020	REALISASI		%
				Desember	SELISIH LBH/(KURANG)			Desember	SELISIH LBH/(KURANG)	
1	2	3	4	7	8	9	4	7	8	9
4.2.2		II. Dana Alokasi Umum	1.205.960.153.000,00	1.205.960.153.000,00	-	100,00%	1.083.715.769.000,00	1.082.389.409.000,00	(1.326.360.000,00)	99,88%
4.2.2.01		Dana Alokasi Umum	1.205.960.153.000,00	1.205.960.153.000,00	-	100,00%	1.083.715.769.000,00	1.082.389.409.000,00	(1.326.360.000,00)	99,88%
4.2.2.01.01		Dana Alokasi Umum	1.205.960.153.000,00	1.205.960.153.000,00	-	100,00%	1.083.715.769.000,00	1.082.389.409.000,00	(1.326.360.000,00)	99,88%
		JUMLAH II	1.205.960.153.000,00	1.205.960.153.000,00	-	100,00%	1.083.715.769.000,00	1.082.389.409.000,00	(1.326.360.000,00)	99,88%
4.2.3		III. Dana Alokasi Khusus	357.657.865.000,00	308.247.196.668,00	(49.410.668.332,00)	86,18%	376.278.129.000,00	373.956.768.758,00	(2.321.360.242,00)	99,38%
4.2.3.01		Dana Alokasi Khusus (DAK)	87.050.588.000,00	64.041.244.295,00	(23.009.343.705,00)	73,57%	74.358.475.000,00	73.431.343.386,00	(927.131.614,00)	98,75%
4.2.3.01.01		DAK Bidang Pendidikan	30.220.490.000,00	21.154.343.000,00	(9.066.147.000,00)	70,00%	32.033.806.000,00	31.357.907.200,00	(675.898.800,00)	97,89%
4.2.3.01.02		DAK Bidang Kesehatan	14.302.158.000,00	13.117.343.295,00	(1.184.814.705,00)	91,72%	15.295.561.000,00	15.044.328.186,00	(251.232.814,00)	98,36%
4.2.3.01.08		DAK Bidang Infrastruktur Jalan	30.486.015.000,00	21.340.210.500,00	(9.145.804.500,00)	70,00%	27.029.108.000,00	27.029.108.000,00	-	100,00%
4.2.3.01.02		DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	6.041.925.000,00	4.229.347.500,00	(1.812.577.500,00)	70,00%	-	-	-	#DIV/0!
4.2.3.01.08		DAK Bidang Pertanian	6.000.000.000,00	4.200.000.000,00	(1.800.000.000,00)	70,00%	-	-	-	#DIV/0!
4.2.3.02		Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	195.494.687.000,00	190.307.995.713,00	(5.186.691.287,00)	97,35%	203.848.263.000,00	205.016.220.789,00	1.167.957.789,00	100,57%
4.2.3.02.01		Bantuan Operasional Sekolah	156.333.038.000,00	152.829.958.000,00	(3.503.080.000,00)	97,76%	163.241.130.000,00	161.049.110.000,00	(2.192.020.000,00)	98,66%
4.2.3.02.01		BO Kesehatan dan BO KB Akreditasi Rumah Sakit	2.724.000.000,00	2.145.525.146,00	(578.474.854,00)	78,76%	6.833.817.000,00	10.019.341.973,00	3.185.524.973,00	146,61%
4.2.3.02.03		Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	2.992.800.000,00	2.806.580.210,00	(186.219.790,00)	93,78%	1.900.000.000,00	1.866.814.153,00	(33.185.847,00)	98,25%
4.2.3.02.04		Tunjangan Profesi Guru	28.681.516.000,00	28.681.516.000,00	-	100,00%	30.131.764.000,00	30.131.764.000,00	-	100,00%
4.2.3.02.05		Tambahan Penghasilan Guru	1.398.000.000,00	1.518.750.000,00	120.750.000,00	108,64%	1.122.000.000,00	1.446.000.000,00	324.000.000,00	128,88%
4.2.3.02.06		Tunjangan Khusus Guru	1.846.450.000,00	1.285.626.040,00	(560.823.960,00)	-	351.414.000,00	351.414.000,00	-	100,00%
4.2.3.02.07		Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.518.883.000,00	1.040.040.317,00	(478.842.683,00)	68,47%	268.138.000,00	151.776.663,00	(116.361.337,00)	56,60%
4.2.3.03		Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	75.112.590.000,00	53.897.956.660,00	(21.214.633.340,00)	71,76%	98.071.391.000,00	95.509.204.583,00	(2.562.186.417,00)	97,39%
4.2.3.03.01		Bidang Pendidikan	5.000.000.000,00	3.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	70,00%	68.234.115.000,00	66.032.459.483,00	(2.201.655.517,00)	96,77%
4.2.3.03.02		Bidang Jalan	33.725.741.000,00	23.608.018.700,00	(10.117.722.300,00)	70,00%	24.411.676.000,00	24.411.676.000,00	-	100,00%
4.2.3.03.03		Bidang Irigasi	25.979.340.000,00	18.185.538.000,00	(7.793.802.000,00)	70,00%	-	-	-	#DIV/0!
4.2.3.03.04		Bidang-Bidang Kesehatan	4.431.000.000,00	4.420.843.660,00	(10.156.340,00)	99,77%	2.915.994.000,00	2.857.738.000,00	(58.256.000,00)	98,00%
4.2.3.03.05		Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan (Kehutanan)	3.160.948.000,00	2.212.663.600,00	(948.284.400,00)	70,00%	1.541.047.000,00	1.238.772.100,00	(302.274.900,00)	80,39%
4.2.3.03.06		DAK Afirmasi Bidang Pendidikan	2.815.561.000,00	1.970.892.700,00	(844.668.300,00)	70,00%	968.559.000,00	968.559.000,00	-	100,00%
		JUMLAH III	357.657.865.000,00	308.247.196.668,00	(49.410.668.332,00)	86,18%	376.278.129.000,00	373.956.768.758,00	(2.321.360.242,00)	99,38%
4.3		C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	295.200.000,00	34.986.015.171,00	34.690.815.171,00	11851,63%	-	1.136.740.000,00	1.136.740.000,00	#DIV/0!
4.3.1		I. Pendapatan Hibah	295.200.000,00	908.370.000,00	613.170.000,00	307,71%	-	-	-	#DIV/0!
4.3.1.01		Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	2.589.631.880,00	-	(2.589.631.880,00)	-
4.3.1.01.01		Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	2.589.631.880,00	-	(2.589.631.880,00)	-
4.3.1.03		Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	295.200.000,00	308.000.000,00	12.800.000,00	104,34%	295.200.000,00	336.000.000,00	40.800.000,00	-
4.3.1.03.01		Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	295.200.000,00	308.000.000,00	12.800.000,00	104,34%	295.200.000,00	336.000.000,00	40.800.000,00	-
4.3.1.04		Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	400.370.000,00	400.370.000,00	-	-	-	-	-
4.3.1.04.03		Sumbangan Pihak Ketiga	-	400.370.000,00	400.370.000,00	-	-	-	-	-
		JUMLAH I	295.200.000,00	908.370.000,00	613.170.000,00	307,71%	2.884.831.880,00	336.000.000,00	(2.548.831.880,00)	11,65%
4.3.6		II. Pendapatan Lainnya	-	34.077.645.171,00	34.077.645.171,00	-	24.500.000.000,00	34.077.645.171,00	34.077.645.171,00	-
4.3.6.01		Pendapatan Lainnya	-	34.077.645.171,00	34.077.645.171,00	-	24.500.000.000,00	-	(18.863.934.674,00)	-
4.3.6.01.01		Pendapatan Lainnya	-	34.077.645.171,00	34.077.645.171,00	-	24.500.000.000,00	-	(18.863.934.674,00)	-
		JUMLAH II	-	34.077.645.171,00	34.077.645.171,00	-	49.000.000.000,00	-	(49.000.000.000,00)	-
		JUMLAH	2.633.076.372.843,99	2.615.420.980.053,82	(17.655.392.790,17)	99,33%	2.458.371.176.543,15	2.378.441.957.730,47	(79.929.218.812,68)	96,75%

2.3.1 Jenis Pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah adalah:

Pajak Daerah :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Alat Berat
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5. Pajak Air Permukaan
6. Pajak Rokok
7. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Retribusi Daerah :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

1. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat
4. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat
5. Pendapatan Denda Air Permukaan
6. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
8. Pendapatan dari Pengembalian
9. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak

dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas/Badan Tekhnis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Tantangan dalam Pelayanan pada Era globalisasi dan keterbukaan informasi, diharapkan pelayanan publik semakin efisien dan terukur baik dari segi waktu dan pembiayaan. Disamping itu juga mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat di daerah-daerah strategis dan potensial, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah/retribusi daerah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, maka dilakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan menambah loket layanan samsat seperti Samsat Pembantu, Samsat Payment Point, Samsat Corner dan Samsat Keliling, Sehingga diharapkan pelayanan di seluruh wilayah Kalimantan Utara lebih mudah dan cepat. Selain isu tersebut diatas, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara kedepan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi - instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
2. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengoptimalkan Sektor Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Menyempurnakan sistem dan prosedur serta tata kerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan kegiatan yang SDMnya belum tersedia;
4. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Adapun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara di bawah ini terdapat beberapa permasalahan yang merupakan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan maupun pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (membayar pajak sesuai ketentuan);
2. Masih terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelayanan publik untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah;
4. Masih terbatasnya tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi dengan dinas/badan teknis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing OPD;
5. Masih terbatasnya regulasi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah;
6. Sangsi yang tidak dapat ditegakkan karena Bapenda tidak memiliki SDM yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Aset dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil);

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode Tahun 2022 – 2026 adalah :

***“TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH,
MAJU DAN SEJAHTERA”***

Dalam rumusan visi diatas terdapat beberapa kata kunci sebagai pokok-pokok visi, yaitu **Berubah, Maju dan Sejahtera** dapat dimaknai sebagai keinginan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjadikan provinsi ini yang mampu memberikan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih terjangkau, lebih berkelanjutan, dan lebih terjamin bagi warganya dengan memanfaatkan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK).
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;

6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar Kabupaten/Kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Provinsi Kabudaya, Provinsi Kerayan, Provinsi Apo Kayan.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program Pembangunan Daerah dimana, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 termasuk dalam ***Misi ke 6 (enam)*** yaitu, ***Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi***

kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar Kabupaten/Kota;

Program perangkat daerah merupakan indikasi program dari masing-masing Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Program-program ini, disusun dengan memperhatikan kebutuhan program pembangunan sebagaimana menjadi arahan di dalam visi dan misi pembangunan daerah yang bersifat prioritas, maupun program-program pembangunan sebagai bagian dari pemenuhan urusan pembangunan yang wajib dasar, non dasar, maupun urusan pilihan dan penunjang urusan.

Program-program pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam pelaksanaan oleh masing-masing Perangkat Daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 6) Pengadaan Aset Tidak Berwujud
 - 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 2) Pengelohan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah
- 4) Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah

3.3 Telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Mengoptimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Mewujudkan aparatur pendapatan daerah yang profesional, jujur, bersih dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan kesadaran hukum bagi wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali dan kembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
3. Selalu mengedepankan kerjasama antar instansi pengelola pendapatan daerah, juga koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik.
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara demi peningkatan kualitas SDM dalam melayani publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan kawasan perbatas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup meliputi pengembangan system jaringan prasarana lainnya berupa energi, listrik, sumber daya air dan komunikasi. Dari isu strategis tersebut diharapkan meningkatnya pelayanan perpajakan yaitu dengan rencana pengembangan system aplikasi pelayanan pajak daerah dan pembangunan system informasi manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online. Sehingga dengan tersedianya data elektronik tersebut melalui system jaringan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baik di era globalisasi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Analisis SWOT

3.5.1.1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya Sistem Komputerasisasi Sismiop;
- 2) Pimpinan yang visible
- 3) Tersedianya anggaran /dana yang memadai
- 4) Adanya Perda sebagai dasar hukum
- 5) Motivasi kerja pegawai baik
- 6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Bapenda

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Sistem pendataan belum efektif
- 2) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
- 3) Kualitas pelayanan belum optimal
- 4) Koordinasi internal dan eksternal belum optimal
- 5) Lemahnya penegakan aturan
- 6) Responsibilitas dan responsivitas rendah

3.5.1.2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
- 2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- 3) Perkembangan PDRB dan incom perkapita positif
- 4) Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
- 5) Kondisi sosial aman dan kondusif
- 6) Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat)
- 7) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer
- 8) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis
- 9) Kesiapan pihak swasta dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 10) Bantuan dan insentif dari pemerintah

b. Ancaman (*Threat*)

- 1) Kondisi sosial politik tidak stabil
- 2) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (ekstensifikasi)
- 3) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah

3.5.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis

3.5.2.1. Isu strategis kombinasi antara Strength dengan Opportunity (Isu Strategi- SO)

- a. Melakukan pendataan Potensi PAD secara efektif. Dengan adanya faktor peluang yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara berupa kebijakan pemerintah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang berdimensi keuangan (O1), pertumbuhan ekonomi masyarakat (PDRB dan Incom Perkapita) positif (O3) dan pertambahan potensi PAD yang terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat (O4) yang didukung oleh faktor kekuatan yang secara internal dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Adanya Sistim Komputerisasi Sismiop yang dapat mengakses data secara akurat (S1), Pimpinan yang visioner (S2), tersedianya anggaran yang memadai (S3) dan motivasi kerja pegawai yang baik (S5) sangat menunjang untuk melakukan strategi kegiatan pendapatan potensi PAD secara efektif sehingga dapat tersedia data base Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akurat.
- b. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan PAD. Dengan adanya faktor peluang yang tersedia berupa adanya dukungan pihak eksekutif dan legislatif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD (O2), dan adanya kesediaan pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan PAD (O9) yang didukung dengan kekuatan internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara berupa pimpinan yang

visioner (S1), adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Bapenda Provinsi Kalimantan Utara (S6).

3.5.2.2 Isu Strategis kombinasi antara Strength dengan Threat (Isu ST)

- a. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara berupa resistensi (penolakan) terhadap perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi (T3), rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (T4) yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran yang memadai (S3), adanya Perda dan Perwali sebagai dasar hukum (S4) dan komitmen pimpinan dan staf (S6) dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik.
- b. Melakukan penegakan aturan (law enforcement).
Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa kondisi politik yang tidak stabil (T1) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (T4) dengan kekuatan internal seperti adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf

untuk mewujudkan misi (S6) dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan aturan (law enforcement) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap masyarakat yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan.

3.5.2.3. Isu Strategis dan kombinasi antara Weakness dan Opportunity (Isu Strategis W-O)

a. Meningkatkan Penerimaan.

Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara seperti sistem pendataan belum efektif (W1), kualitas pelayanan belum optimal (W3), kondisi ini harus direspon dan diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan Eksekutif dan legislatif (O2), dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8), akan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih profesional, baik dibidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer Sismiop maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.

b. Mengoptimalkan Koordinasi.

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara antara lain berupa pendataan yang tidak efektif (W1), rendahnya kualitas pelayanan (W3) dan koordinasi yang tidak optimal (W4) yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan Eksekutif dan legislatif (O2) dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8) melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.

c. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja.

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai (W2) dan rendahnya kualitas pelayanan (W3) perlu direspon segera guna meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), dukungan eksekutif dan legislatif (O2) akan sangat mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD.

3.5.2.4. Isu Strategis Weakness dengan Threath (isu Strategi W-T)

Isu ini timbul sebagai adanya konfirmasi antara isu-isu kelemahan dengan isu-isu ancaman, dimana organisasi harus secara definsi berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari deretan ancaman yang dihadapi. Isu

strategis ini mungkin agak menyulitkan, karena organisasi akan berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan dirinya dari ancaman Adapun isu-isu strategis tersebut sebagai berikut;

- a. Isu Strategis Kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kekuatan (**Strength**) dengan isu strategis kelompok peluang (**Opportunity**), (isu strategis S-O), diperoleh dua isu strategis, yaitu;
 1. Bagaimana melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akurat.
 2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta/ masyarakat dalam pengelolaan maupun pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Isu Strategis Hasil Kombinasi/perpaduan antara isu strategis kelompok antara kekuatan (**Strength**) dengan isu strategis kelompok ancaman (**Threats**) (isu Strategis S-T), memunculkan isu strategis, yakni;
 1. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang Perda-Perda dan Pergup yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Bagaimana menegakkan aturan (law enforcement) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.
- c. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (**Weaknes**) dengan isu strategis kelompok isu strategis peluang (**Opportunity**) (isu Strategis W-O), dapat diformulasikan tiga isu strategis, yakni;
 1. Bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/ pegawai.

2. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern)
3. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
- d. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (**Weakness**) dengan kelompok isu strategis ancaman (**Threats**), (isu Strategis W-T), dirumuskan satu isu strategis yaitu :

"Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat (Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Diidentifikasi tersebut, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut;

➤ Isu-1.

Bagaimana melakukan pendataan potensi PAD secara efektif (**SO**) Isu ini dimunculkan karena selama ini data (**data base**) tentang potensi PAD belum tersedia secara akurat, sementara potensi PAD cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian (kegiatan ekonomi) namun tidak diikuti dengan pendataan terhadap potensi PAD (subjek/objek) pajak/retribusi daerah secara efektif karena masih banyak subjek dan objek pajak/retribusi daerah yang belum terdata dengan baik.

➤ Isu-2.

Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah pengelolaan/ pemungutan pajak/retribusi daerah Isu ini muncul karena adanya kekuatan berupa komitmen Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara untuk

meningkatkan PAD dan berbagai acuan hukum (perda) yang memberikan kewenangan untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan atau pemungutan PAD.

➤ Isu-3.

Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan tentang ketentuan perundang-undangan tentang PAD kepada masyarakat (**ST**). Isu ini muncul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi maupun penolakan terhadap pemberlakuan perda-perda baru yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam ekstensifikasi PAD.

➤ Isu-4.

Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/aparat (**WO**). Tak dapat disangkal bahwa ketersediaan SDM yang memadai baik kuantitas maupun kualitas akan dapat mendukung daya kerja dari suatu organisasi. Isu ini muncul karena kondisi riil menginformasikan bahwa secara kualitas dan kuantitas aparat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara masih rendah bila dibandingkan dengan volume/beban kerja yang begitu tinggi dan kompleks, sehingga perlu diminimalisir kelemahan tersebut dengan memanfaatkan peluang dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

➤ Isu-5.

Bagaimana mengoptimalkan koordinasi interen dan dengan instansi terkait. (**WO**).

Isu ini muncul berkaitan adanya kelemahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan koordinasi baik dalam internal kantor

maupun dengan instansi terkait lainnya. Isu dapat dilakukan dengan adanya kewenangan sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah untuk mengkoordinir instansi-instansi pengelola PAD yang sudah ada maupun yang baru terbentuk sehingga dapat tercipta sinergitas dan kerjasama yang harmonis.

➤ Isu-6.

Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja (**WO**). Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat efisien dan efektif seperti sistem komputerisasi hendaknya dapat dimanfaatkan.

➤ Isu-7.

Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (**WT**).

Terlepas dari mandat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai institusi pengelola PAD yang salah satu fungsinya yaitu memunggut pajak, namun tidak boleh dilupakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai organisasi publik dimensi utamanya dalam manajemen urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service).

Hasil kombinasi kelompok isu strategis lingkungan internal (peluang dan ancaman), telah dapat diperoleh 8 (Delapan) isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kinerjanya sebagaimana diuraikan diatas dapat diurutkan sebagai berikut;

1. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi yang akurat.
2. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan pemungutan PAD.
3. Bagaimana Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan (perda) yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Bagaimana Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara menegakkan aturan (*law enforcement*) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.
5. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan kualitas aparatnya.
6. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengoptimalkan kooordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern)
7. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
8. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

3.5.2.5. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara

kedepan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinue baik melalui Media massa, Diskusi Panel, seminar atau simposium tentang arti pentingnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Gubernur, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum.
3. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian
5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) dibidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.

6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

“Menjadi Lembaga Profesional dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pelayanan Prima pada Masyarakat menuju Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Visi tersebut merupakan sumber inspirasi yang menantang sekaligus komitmen Badan Pendapatan Daerah untuk bekerja sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan untuk mewujudkan kondisi dimana Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melepaskan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam Bidang Pembiayaan Daerah dengan mengutkan struktur Pendapat Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Visi tersebut juga merupakan tekad dan monitmen bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asliu Daerah yang dimiliki daerah secara optimal dengan mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan dan melaksanakan beberapa misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur
2. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung
3. Menyediakan Dukungan Regulasi Pungutan yang memadai
4. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Daerah yang optimal melalui Ekstensifikasi dan intensifikasi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, serta sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.2.1 Tujuan

1. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan daerah
2. Peningkatan Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak dan retribusi Daerah
3. Terciptanya sumber Data Manusia yang berpotensi dalam pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya.

4.2.2 Sasaran

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah yang berorientasi pelayanan publik yang berkualitas
2. Intesifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
3. Koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya.
4. Pengembangan sistem karir (Carier Planning) dan penerapan Sistem Reward and Punishment



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN	TARGET KINERJA UTAMA /SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana ditampilkan dalam table dibawah ini :

Tabel 5.1
Startegi dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH , MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI 6 : Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	1 Pengelolaan Potensi Penerimaan Pendapatan Asli daerah yang baik	1.1 Updating database Potensi Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah
		2 Meningkatnya kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerja terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.1 Meningkatnya Sinergisitas Implementasi Regulasi dengan Mitra Kerja Pengelolaan Pendapatan daerah
		3 Menambah titik layanan untuk mendekatkan layanan pada masyarakat	3.1 Penggunaan aplikasi pendukung pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis internet
		4 Mengembangkan Teknologi untuk mempermudah pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4.1 Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik	1 Meningkatkan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah dengan penerapan SOP	1.1 Meningkatkan Standar Pelayanan
		2 Meningkatnya Kemudahan Akses Layanan	2.1 Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi daerah, sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan melibatkan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga. Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026, dan sebagai arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka berikut ini disusunlah Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL PERUBAHAN RENSTRA PERANGAKAT DAERAH TAHUN 2021 SD 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Keuangan			41.475.540.005		42.496.190.005		45.089.925.005		48.016.923.505		50.875.392.305		Keuangan			49.701.240.814		50.294.775.096		51.267.744.434
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	38.187.040.005	100%	38.798.840.005	100%	41.072.840.005	100%	43.668.130.005	100%	46.181.720.305	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	46.601.240.814	100%	47.194.775.096	100%	48.000.800.018
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	200.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	200.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	30.723.840.000	12 Bulan	32.823.840.000	12 Bulan	35.070.840.000	12 Bulan	37.475.130.000	12 Bulan	40.047.720.300		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	35.337.428.000	12 Bulan	36.838.305.080	12 Bulan	37.860.330.000
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	30.000.000.000	12 Bulan	32.100.000.000	12 Bulan	34.347.000.000	12 Bulan	36.751.290.000	12 Bulan	39.323.880.300		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang / Bulan	34.977.098.000	123 Orang / Bulan	36.477.975.080	123 Orang / Bulan	37.500.000.000
	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	723.840.000	12 Bulan	723.840.000	12 Bulan	723.840.000	12 Bulan	723.840.000	12 Bulan	723.840.000		Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	360.330.000	12 Dokumen	360.330.000	12 Dokumen	360.330.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	630.000.000	12 Bulan	630.000.000	12 Bulan	690.000.000	12 Bulan	820.000.000	12 Bulan	900.000.000		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	878.600.000	12 Bulan	942.000.000	12 Bulan	1.396.000.000
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					123 Paket	246.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	15 Orang	200.000.000	15 Orang	200.000.000	20 Orang	250.000.000	25 Orang	300.000.000	30 Orang	350.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	312.000.000	20 Orang	312.000.000	20 Orang	350.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	2 Kegiatan	350.000.000	2 Kegiatan	350.000.000	8 Kegiatan	350.000.000	8 Kegiatan	400.000.000	8 Kegiatan	400.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	500 Orang	336.600.000	500 Orang	400.000.000	500 Orang	400.000.000
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	15 Orang	80.000.000	15 Orang	80.000.000	20 Orang	90.000.000	25 Orang	120.000.000	30 Orang	150.000.000		Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	230.000.000	20 Orang	230.000.000	60 Orang	400.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.728.200.000	12 Bulan	2.439.000.000	12 Bulan	2.500.000.000	12 Bulan	2.560.000.000	12 Bulan	2.570.000.000		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.683.570.500	12 Bulan	2.806.000.000	12 Bulan	3.211.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Unit	3.200.000	15 Unit	4.000.000	25 Unit	5.000.000	25 Unit	5.000.000	25 Unit	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	4.990.500	5 Paket	350.000.000	5 Paket	5.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 Unit	450.000.000	30 Unit	150.000.000	15 Unit	150.000.000						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	1.482.500.000			20 Paket	500.000.000
														Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	50.000.000
	Penyediaan bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	450.000.000		Penyediaan bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	530.000.000	10 Paket	750.000.000	10 Paket	900.000.000
	Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	560.000.000	12 Bulan	570.000.000	12 Bulan	580.000.000	12 Bulan	590.000.000		Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	6 Paket	760.240.000	6 Paket	750.000.000	6 Paket	750.000.000
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2.000 Eksempler	25.000.000	2.000 Eksempler	25.000.000	2.000 Eksempler	25.000.000	2.000 Eksempler	25.000.000	2.000 Eksempler	25.000.000		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang Disediakan	365 Dokumen	5.840.000	365 Dokumen	6.000.000	365 Dokumen	6.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	12 Bulan	1.300.000.000	12 Bulan	1.300.000.000	12 Bulan	1.300.000.000	12 Bulan	1.500.000.000	12 Bulan	1.500.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	900.000.000	190 Laoran	950.000.000	200 Laporan	1.000.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	25 Unit	1.150.000.000	15 Unit	250.000.000	5 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000				Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	5 Unit	3.953.702.300	6 Unit	3.650.000.000	4 Unit	2.850.000.000
														Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			5 Unit	1.500.000.000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	800.000.000										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	1.000.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	10 Unit	150.000.000	15 Unit	250.000.000			10 Unit	150.000.000				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					5 Paket	1.000.000.000
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	100.000.000		
														Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	1 Unit	550.000.000	1 Unit	750.000.000
	Pengadaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	10 Unit	200.000.000			5 Unit	150.000.000						Pengadaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000		
														Pengadaan Gedung Kantor atau Banguan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.250.000.000		1.400.000.000		
														Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	253.702.300		-		-
														Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000	

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.365.000.000	12 Bulan	1.366.000.000	12 Bulan	1.367.000.000	12 Bulan	1.368.000.000	12 Bulan	1.369.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.458.470.000	12 Bulan	1.483.000.000	12 Bulan	1.558.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah Layanan jasa surat menyurat yang disediakan	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	19.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	800.000.000	12 Bulan	800.000.000	12 Bulan	800.000.000	12 Bulan	800.000.000	12 Bulan	800.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	772.470.000	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	800.000.000	
														Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	550.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	672.000.000	12 Laporan	675.000.000	12 Laporan	750.000.000	
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	77 Unit	1.440.000.005	76 Unit	1.140.000.005	76 Unit	1.145.000.005	76 Unit	1.145.000.005	76 Unit	1.145.000.005		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	87 Unit	1.189.470.014	31 Unit	1.325.470.016	29 Unit	925.470.018	
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinannya	26 Unit	550.000.000	26 Unit	550.000.000	26 Unit	550.000.000	26 Unit	550.000.000	26 Unit	550.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	475.470.000	26 Unit	450.470.000	26 Unit	450.470.000	
														Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dilakukan Pemeliharaan	45 Unit	40.000.000	45 Unit	40.000.000	45 Unit	45.000.000	45 Unit	45.000.000	45 Unit	45.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	9.000.000					
														Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	50.000.000	

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026								
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000		Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas	4 Unit	550.000.000	3 Unit	250.000.000	3 Unit	250.000.000	3 Unit	250.000.000	3 Unit	250.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	3 Unit	300.000.000				
														Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	50.000.000		
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	50.000.000		
														Pemeliharaan / Rehabilitas Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi			1 Ha	350.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	3.288.500.000	100%	3.697.350.000	100%	4.017.085.000	100%	4.348.793.500	100%	4.693.672.000	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	3.100.000.000	100%	3.100.000.000	100%	3.266.944.416
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	3.288.500.000	12 Bulan	3.697.350.000	12 Bulan	4.017.085.000	12 Bulan	4.348.793.500	12 Bulan	4.693.672.000		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	36 Dokumen	3.100.000.000	36 Dokumen	3.100.000.000	48 Dokumen	3.266.944.416
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	2.200.000.000	12 Bulan	2.500.000.000	12 Bulan	2.700.000.000	12 Bulan	2.900.000.000	12 Bulan	3.100.000.000		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	900.000.000	12 Laporan	900.000.000	12 Laporan	900.000.000
														Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Pengelohan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	900.000.000	12 Laporan	900.000.000	12 Laporan	900.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	12 Bulan	1.088.500.000	12 Bulan	1.197.350.000	12 Bulan	1.317.085.000	12 Bulan	1.448.793.500	12 Bulan	1.593.672.000		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	1.300.000.000	12 Laporan	1.300.000.000	12 Laporan	1.300.000.000
														Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	166.944.416	

TABEL PERUBAHAN RENSTRA PERANGAKAT DAERAH TAHUN 2021 SD 2026

UPTD. BAPENDA BULUNGAN

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026								
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Keuangan			3.654.000.000		3.501.000.000		3.556.000.000		3.697.500.000		3.712.500.000		Keuangan			3.596.000.000		3.800.000.000		4.000.000.000
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	3.124.000.000	100%	2.971.000.000	100%	3.026.000.000	100%	3.117.500.000	100%	3.132.500.000	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	3.121.000.000	100%	3.262.500.000	100%	3.257.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	165.000.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	165.000.000
	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	165.000.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	160.000.000	12 Dok	165.000.000	12 Dok	165.000.000
														Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	120.000.000
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	-	40 Paket	100.000.000	0	-
														Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	5 Orang	60.000.000
														Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	5 Orang	60.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	993.000.000	12 Bulan	884.000.000	12 Bulan	879.000.000		885.000.000		900.000.000		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	569.000.000	12 Bulan	595.000.000	12 Bulan	560.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Unit	8.000.000	5 Unit	8.000.000	5 Unit	8.000.000	5 Unit	9.000.000	5 Unit	9.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	8.000.000	5 Paket	9.000.000	5 Paket	9.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Unit	137.000.000	3 Unit	30.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	30.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	80.000.000	1 Paket	15.000.000	2 Paket	30.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Unit	17.000.000	4 Unit	15.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	20.000.000	3 Paket	20.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	15.000.000	3 Paket	20.000.000	3 Paket	20.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	385.000.000	12 Bulan	385.000.000		Penyediaan bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	160.000.000	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.000.000		Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	5 Paket	95.000.000	5 Paket	95.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	1.095 Eks	6.000.000	1.095 Eks	6.000.000	1.095 Eks	6.000.000	1.095 Eks	6.000.000	1.095 Eks	6.000.000		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	700 Dokumen	6.000.000	700 Dokumen	6.000.000	700 Dokumen	6.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	355.000.000	12 Bulan	355.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	200.000.000	100 Laporan	250.000.000	100 Laporan	200.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	3 Unit	54.000.000	3 Unit	10.000.000	-	-	-	-	-	-		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan			3 Unit	130.000.000	3 Unit	100.000.000
														Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel kantor yang disediakan	3 Unit	54.000.000	3 Unit	10.000.000								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	30.000.000		
														Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	100.000.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.402.000.000	12 Bulan	1.402.000.000	12 Bulan	1.402.000.000	12 Bulan	1.457.500.000	12 Bulan	1.457.500.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.827.000.000	12 Bulan	1.827.500.000	12 Bulan	1.827.500.000
	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah Layanan jasa surat menyurat yang disediakan	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	7.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laopran	7.000.000	12 Laopran	7.500.000	12 Laopran	7.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	195.000.000	12 Bulan	195.000.000	12 Bulan	195.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laopran	220.000.000	12 Laopran	220.000.000	12 Laopran	220.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	1.200.000.000	12 Bulan	1.200.000.000	12 Bulan	1.200.000.000	12 Bulan	1.250.000.000	12 Bulan	1.250.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laopran	1.600.000.000	12 Laopran	1.600.000.000	12 Laopran	1.600.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharannya	17 Unit	515.000.000	17 Unit	515.000.000	76 Unit	585.000.000		610.000.000		610.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharannya	68 Unit	465.000.000	68 Unit	345.000.000	73 Unit	485.000.000
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	1 Unit	30.000.000	4 Unit	30.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinannya	5 Unit	400.000.000	5 Unit	400.000.000	5 Unit	400.000.000	5 Unit	420.000.000	5 Unit	420.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	250.000.000	26 Unit	200.000.000	26 Unit	200.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dilakukan Pemeliharaan	10 Unit	35.000.000	10 Unit	35.000.000	10 Unit	35.000.000	10 Unit	40.000.000	10 Unit	40.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	35.000.000	40 Unit	35.000.000	40 Unit	35.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas	2 Unit	80.000.000	2 Unit	80.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	180.000.000	1 Unit	80.000.000	2 Unit	140.000.000
														Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	80.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	530.000.000	100%	530.000.000	100%	530.000.000	100%	580.000.000	100%	580.000.000	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	475.000.000	100%	537.500.000	100%	742.500.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	530.000.000	12 Bulan	530.000.000	12 Bulan	530.000.000	12 Bulan	580.000.000	12 Bulan	580.000.000		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.524 Dokumen	475.000.000	1.524 Dokumen	537.500.000	1.524 Dokumen	742.500.000
														Pendaataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	102.500.000	12 Laporan	287.500.000
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1500 Dokumen SSPD	180.000.000	1500 Dokumen SSPD	180.000.000	1500 Dokumen SSPD	200.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Bulan	310.000.000	12 Bulan	310.000.000	12 Bulan	310.000.000	12 Bulan	330.000.000	12 Bulan	330.000.000		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	255.000.000	12 Laporan	255.000.000	12 Laporan	255.000.000

TABEL PERUBAHAN RENSTRA PERANGAKAT DAERAH TAHUN 2021 SD 2026

UPTD. BAPENDA TARAKAN

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Keuangan			10.338.254.341		39.517.193.394		5.050.428.911		5.646.417.906		6.316.695.090		Keuangan			4.113.000.000		5.900.000.000		6.500.000.000	
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	9.618.999.934	100%	38.726.013.547	100%	4.180.131.079		4.689.090.291		5.263.634.714	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	3.673.000.000		5.399.445.000		5.929.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	150.084.000	12 Bulan	162.092.400	12 Bulan	181.601.640	12 Bulan	199.761.804	12 Bulan	219.737.984		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	200.000.000	
	Penyediaan Adminitrsi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	150.084.000	12 Bulan	162.092.400	12 Bulan	181.601.640	12 Bulan	199.761.804	12 Bulan	219.737.984		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	180.000.000	12 Dokumen	200.000.000	
	Adminitrsi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	88.000.000	12 Bulan	96.800.000	12 Bulan	106.480.000	12 Bulan	117.128.000		Adminitrsi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	233.980.000	12 Bulan	207.500.000	
														Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	50.000.000	25 Paket	50.000.000	12 Paket	12.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	80.000.000	6 Orang	88.000.000	6 Orang	96.800.000	6 Orang	106.480.000	6 Orang	117.128.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	20.000.000	10 Orang	106.480.000	15 Orang	115.000.000	
														Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 Orang	25.000.000	100 Orang	27.500.000	100 Orang	30.000.000	
														Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	35.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.086.254.538	12 Bulan	930.805.631	12 Bulan	1.023.886.194	12 Bulan	1.126.274.814	12 Bulan	1.238.902.296		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	923.000.000	12 Bulan	1.340.500.000	12 Bulan	1.475.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Unit	16.017.254	12 Unit	17.618.979	12 Unit	19.380.877	12 Unit	21.318.965	12 Unit	23.450.862		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	19.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	23.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Unit	300.000.000	6 Unit	65.925.640	6 Unit	72.518.204	6 Unit	79.770.024	6 Unit	87.747.027		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	35.000.000	7 Paket	280.000.000	7 Paket	310.000.000	
	Penyediaan bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor	12 Bulan	262.856.284	12 Bulan	289.141.912	8 Bulan	318.056.103	12 Bulan	349.861.714	12 Bulan	384.847.885		Penyediaan bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	300.000.000	11 Paket	350.000.000	11 Paket	385.000.000	
														Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	10 Paket	10.000.000	10 Paket	10.000.000	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - udhangan yang disediakan	1.825 Eksempler	7.381.000	1.825 Eksempler	8.119.100	1.825 Eksempler	8.931.010	1.825 Eksempler	9.824.111	1.825 Eksempler	10.806.522		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanganyang Disediakan	219 Dokumen	9.000.000	219 Dokumen	10.000.000	219 Dokumen	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	605.000.000	12 Bulan	665.500.000	12 Bulan	732.050.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan	550.000.000	305 Laporan	665.500.000	305 Laporan	735.000.000	

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026								
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	16 Unit	6.240.000.000	9 Unit	35.199.500.000	8 Unit	209.475.000	8 Unit	219.948.750	8 Unit	230.946.188		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	10 Unit	155.000.000	48 Unit	230.000.000	48 Unit	230.000.000
														Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000
	Pengadaan Kednaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Unit	550.000.000										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	8 Unit	190.000.000	8 Unit	199.500.000	8 Unit	209.475.000	8 Unit	219.948.750	8 Unit	230.946.188		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	40 Paket	100.000.000	40 Paket	100.000.000
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000	3 Unit	10.000.000	3 Unit	10.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang disediakan	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	35.000.000.000															
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	500.000.000																	
														Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000
														Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026								
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.719.037.796	12 Bulan	1.967.629.556	12 Bulan	2.252.583.689	12 Bulan	2.579.261.911	12 Bulan	2.953.820.933		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.940.000.000	12 Bulan	2.754.965.000	12 Bulan	3.032.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah Layanan jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	16.500.000	12 Bulan	18.150.000	12 Bulan	19.965.000	12 Bulan	21.961.500		Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	19.965.000	12 Laporan	22.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	170.278.196	12 Bulan	187.306.016	12 Bulan	206.036.617	12 Bulan	226.640.279	12 Bulan	249.304.307		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000	12 Laporan	240.000.000	12 Laporan	250.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	78.397.072	12 Bulan	232.656.632	12 Bulan	182.555.126		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	145.000.000	12 Laporan	160.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jsa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	1.333.759.600	12 Bulan	1.543.823.540	12 Bulan	1.950.000.000	12 Bulan	2.100.000.000	12 Bulan	2.500.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.700.000.000	12 Laporan	2.350.000.000	12 Laporan	2.600.000.000
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	25 Unit	343.623.600	25 Unit	377.985.960	25 Unit	415.784.556	25 Unit	457.363.012	25 Unit	503.099.313		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	381 Unit	375.000.000		660.000.000		785.000.000
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026								
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jasa yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinnya	17 Unit	122.623.600	17 Unit	134.885.960	17 Unit	148.374.556	17 Unit	163.212.012	17 Unit	179.533.213		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	150.000.000	22 Unit	165.000.000	22Unit	175.000.000
														Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			40 Unit	50.000.000	40 Unit	50.000.000
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	25.000.000	100 Unit	125.000.000	100 Unit	125.000.000
														Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	100.000.000	7 Unit	50.000.000	7 Unit	150.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan / rehabilitas	2 Unit	90.000.000	2 Unit	99.000.000	2 Unit	108.900.000	2 Unit	119.790.000	2 Unit	131.769.000		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	100.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	130.000.000
														Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi			40 Unit	50.000.000	40 Unit	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan pemeliharaan / direhabilitas	6 Unit	131.000.000	6 Unit	144.100.000	6 Unit	158.510.000	6 Unit	174.361.000	6 Unit	191.797.100		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			30 Unit	50.000.000	30 Unit	55.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	719.254.407	100%	791.179.847	100%	870.297.832		957.327.615		1.053.060.376		Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	440.000.000		500.555.000		570.500.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	719.254.407	12 Bulan	791.179.847	12 Bulan	870.297.832	12 Bulan	957.327.615	12 Bulan	1.053.060.376		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.524 Dokumen	440.000.000	1.524 Dokumen	500.555.000	1.524 Dokumen	570.500.000
														Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	188.000.000
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	204.230.407	12 Bulan	224.653.447	12 Bulan	247.118.792	12 Bulan	271.830.671	12 Bulan	299.013.738		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.500 Dokumen SSPD	190.000.000	1.500 Dokumen SSPD	180.555.000	1.500 Dokumen SSPD	198.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Bulan	365.024.000	12 Bulan	401.526.400	12 Bulan	441.679.040	12 Bulan	485.846.944	12 Bulan	534.431.638		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	220.000.000	12 Laporan	184.500.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	181.500.000	12 Bulan	199.650.000	12 Bulan	219.615.000									

TABEL PERUBAHAN RENSTRA PERANGAKAT DAERAH TAHUN 2021 SD 2026

UPTD. BAPENDA NUNUKAN

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Keuangan			5.760.600.000		3.660.580.000		3.865.960.000		4.199.340.000		4.531.114.153		Keuangan			3.694.140.000		4.350.000.000		4.650.000.000
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	5.210.600.000	100%	2.950.580.000	100%	3.215.960.000	100%	3.499.340.000	100%	3.781.114.153	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	2.844.140.000	100%	3.375.000.000	100%	3.600.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	234.480.000	12 Bulan	257.400.000	12 Bulan	280.320.000	12 Bulan	303.240.000	12 Bulan	326.160.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	175.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	234.480.000	12 Bulan	257.400.000	12 Bulan	280.320.000	12 Bulan	303.240.000	12 Bulan	326.160.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	170.000.000	12 Dok	175.000.000	12 Dok	175.000.000
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Layanan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Layanan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	67.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	70.000.000
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	47.000.000	44 Paket	50.000.000	44 Paket	50.000.000
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2 Orang	10.000.000	3 Orang	15.000.000	4 Orang	20.000.000	5 Orang	25.000.000	6 Orang	30.000.000		Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	20.000.000	5 Orang	25.000.000	6 Orang	20.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daera	12 Bulan	533.800.000	12 Bulan	567.300.000	12 Bulan	605.800.000	12 Bulan	644.300.000	12 Bulan	661.194.153		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	951.140.000	12 Bulan	996.100.000	12 Bulan	1.070.100.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 Unit	7.000.000	14 Unit	8.000.000	18 Unit	9.000.000	20 Unit	10.000.000	22 Unit	11.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	9.000.000	20 Paket	10.000.000	22 Paket	11.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	62.400.000	6 Paket	130.000.000	5 Paket	110.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Unit	25.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	45.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	45.000.000
	Penyediaan bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	158.394.153		Penyediaan bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	236.140.000	12 Paket	175.000.000	12 Paket	160.000.000
	Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan Pengandaan	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	32.500.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	37.500.000	12 Bulan	40.000.000		Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	12 Paket	37.500.000	12 Paket	40.000.000
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	25 Eks	1.800.000	25 Eks	1.800.000	25 Eks	1.800.000	25 Eks	1.800.000	25 Eks	1.800.000		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	3.600.000	730 Dokumen	3.600.000	730 Dokumen	3.600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	280.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	325.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	375.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	600.000.000	120 Laporan	600.000.000	140 Laporan	700.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026								
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	27 Unit	631.400.000	16 Unit	48.000.000	20 Unit	10.000.000		0		0		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	2 Unit	20.000.000				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel kantor yang disediakan	25 Unit	81.400.000	16 Unit	48.000.000	20 Unit	10.000.000						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000				
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000				
	Pengadaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	550.000.000																	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerinahan daerah yang disediakan	12 Bulan	1.440.920.000	12 Bulan	1.642.880.000	12 Bulan	1.844.840.000	12 Bulan	2.036.800.000	12 Bulan	2.238.760.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerinahan daerah yang disediakan	12 Bulan	1.426.000.000	12 Bulan	1.638.900.000	12 Bulan	1.759.900.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat menyurat yang disedi	12 Bulan	4.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	8.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	8.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	180.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	180.000.000
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.000.000		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	45.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	1.281.920.000	12 Bulan	1.462.880.000	12 Bulan	1.643.840.000	12 Bulan	1.824.800.000	12 Bulan	2.005.760.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000.000	12 Laporan	1.426.900.000	12 Laporan	1.526.900.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharannya	18 Unit	2.360.000.000	18 Unit	420.000.000	18 Unit	455.000.000	18 Unit	490.000.000	18 Unit	525.000.000		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharannya	17 Unit	210.000.000	18 Unit	490.000.000	18 Unit	525.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan.	13 Unit	250.000.000	15 Unit	300.000.000	17 Unit	325.000.000	17 Unit	350.000.000	17 Unit	375.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	110.000.000	17 Unit	350.000.000	17 Unit	375.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan / direhabilitas	1 Unit	110.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	140.000.000	1 Unit	150.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan / direhabilitas	1 Unit	100.000.000	1 Unit	140.000.000	1 Unit	150.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan / direhabilitas	1 Unit	2.000.000.000																	

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	550.000.000	100%	710.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000		Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	850.000.000	100%	975.000.000	100%	1.050.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	710.000.000	12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	750.000.000		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.524 Dokumen	850.000.000	1.524 Dokumen	975.000.000	1.524 Dokumen	1.050.000.000
														Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	100.000.000
	Penagihan pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	115.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	140.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	160.000.000		Penagihan pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.500 Dokumen	200.000.000	1.500 Dokumen	200.000.000	1.500 Dokumen	200.000.000
	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Paiak daerah	12 Bulan	435.000.000	12 Bulan	585.000.000	12 Bulan	510.000.000	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	590.000.000		Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	750.000.000

TABEL PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SD 2026

UPTD. BAPENDA MALINAU

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Keuangan			3.199.946.800		4.336.860.000		2.410.960.000		2.454.960.000		2.501.860.000		Keuangan			2.472.560.000		3.200.000.000		3.500.000.000
Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	2.807.846.800	100%	3.922.860.000	100%	1.981.960.000	100%	2.015.960.000	100%	2.049.860.000	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	1.981.960.000	100%	2.350.000.000	100%	2.450.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	136.000.000	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	175.000.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	158.000.000	12 Bulan	162.000.000
	Penyediaan Adminitirasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	136.000.000	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	175.000.000		Penyediaan Adminitirasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	155.000.000	12 Dokumen	158.000.000	12 Dokumen	162.000.000
	Adminitirasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Layanan Adminitirasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	237.000.000	12 Bulan	255.000.000	12 Bulan	258.000.000	12 Bulan	267.000.000	12 Bulan	274.000.000		Adminitirasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Layanan Adminitirasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	290.000.000	12 Bulan	316.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9 Orang	165.000.000	9 Orang	175.000.000	9 Orang	175.000.000	9 Orang	180.000.000	9 Orang	183.500.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	9 Orang	135.000.000	10 Orang	158.500.000
														Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	100 Orang	20.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	9 Orang	72.000.000	9 Orang	80.000.000	9 Orang	83.000.000	9 Orang	87.000.000	9 Orang	90.500.000		Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	10 Orang	50.000.000	10 Orang	55.000.000	10 Orang	57.500.000

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026								
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	874.438.000	12 Bulan	614.560.000	12 Bulan	650.760.000	12 Bulan	661.460.000	12 Bulan	668.560.000		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daera	12 Bulan	681.760.000	12 Bulan	714.460.000	12 Bulan	791.560.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	12 Unit	33.000.000	12 Unit	33.000.000	12 Unit	36.000.000	12 Unit	38.000.000	12 Unit	40.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	36.000.000	12 Paket	36.000.000	12 Paket	40.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Unit	290.000.000	2 Unit	40.122.000	4 Unit	29.000.000	4 Unit	30.500.000	4 Unit	31.500.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.000.000	4 Paket	30.500.000	4 Paket	31.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Unit	10.000.000			5 Unit	7.500.000	-	-	-	-		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7.500.000	-	-	-	-
	Penyediaan bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	172.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	177.000.000		Penyediaan bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	158.000.000	12 Paket	158.000.000	12 Paket	177.000.000
	Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	12 Bulan	34.878.000	12 Bulan	34.878.000	12 Bulan	38.200.000	12 Bulan	39.400.000	12 Bulan	41.500.000		Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	38.200.000	12 Paket	38.400.000	12 Paket	41.500.000
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	730 Eksempler	4.560.000	730 Eksempler	4.560.000	730 Eksempler	6.060.000	730 Eksempler	6.560.000	730 Eksempler	6.560.000		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	1.060.000	730 Dokumen	1.560.000	730 Dokumen	1.560.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	352.000.000	12 Bulan	352.000.000	12 Bulan	362.000.000	12 Bulan	372.000.000	12 Bulan	372.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	412.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	500.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026								
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	1 Unit	380.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	-	-	-	-	-		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	2 Unit	7.000.000	9 Unit	44.000.000	2 Unit	10.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	-	-	1 Unit	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
														Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	5 Paket	26.000.000	-	-	-
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		4 unit	18.000.000			
														Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	7.000.000		2 Unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	670.408.800	12 Bulan	736.300.000	12 Bulan	756.200.000	12 Bulan	759.000.000	12 Bulan	768.800.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	756.200.000	12 Bulan	886.500.000	12 Bulan	986.500.000
	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah layananan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Bulan	5.800.000	12 Bulan	5.800.000	12 Bulan	6.200.000	12 Bulan	6.500.000	12 Bulan	6.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.200.000	12 Laporan	6.500.000	12 Laporan	6.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan	65.500.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	72.500.000	12 Bulan	75.300.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	604.108.800	12 Bulan	665.000.000	12 Bulan	680.000.000	12 Bulan	680.000.000	12 Bulan	687.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	680.000.000	12 Laporan	780.000.000	12 Laporan	880.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	55 Unit	510.000.000	60 Unit	162.000.000	60 Unit	162.000.000	60 Unit	163.500.000	60 Unit	163.500.000		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	60 Unit	162.000.000	60 Unit	257.040.000	60 Unit	183.940.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	10 Unit	105.000.000	15 Unit	120.000.000	15 Unit	120.000.000	15 Unit	120.000.000	15 Unit	120.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	15 Unit	120.000.000	15 Unit	213.540.000	15 Unit	140.440.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	40 Unit	35.000.000	45 Unit	42.000.000	45 Unit	42.000.000	45 Unit	43.500.000	45 Unit	43.500.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	45 Unit	42.000.000	45 Unit	43.500.000	45 Unit	43.500.000
	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan / direhabilitasi	1 Unit	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan pemeliharaan / direhabilitasi	4 Unit	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026								
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	392.100.000	100%	414.000.000	100%	429.000.000	-	452.000.000	-	452.000.000		Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	490.600.000	100%	850.000.000	100%	1.050.000.000
	Kegiatan Pengelolaan F	Jumlah Pelaksanaan Ke	12 Bulan	392.100.000	12 Bulan	414.000.000	12 Bulan	429.000.000	-	452.000.000	-	452.000.000		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.224 Dokumen	490.600.000	1.224 Dokumen	850.000.000	1.224 Dokumen	1.050.000.000
														Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	145.300.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	375.000.000
	Penagihan pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	156.100.000	12 Bulan	167.000.000	12 Bulan	172.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	175.000.000		Penagihan pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.200 Dokumen SSPD	145.300.000	1.200 Dokumen SSPD	300.000.000	1.200 Dokumen SSPD	375.000.000
	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	12 Bulan	236.000.000	12 Bulan	247.000.000	12 Bulan	257.000.000	12 Bulan	277.000.000	12 Bulan	277.000.000		Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	300.000.000

TABEL PERUBAHAN RENSTRA PERANGAKAT DAERAH TAHUN 2021 SD 2026

UPTD. BAPENDA KTT

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Keuangan			3.380.140.242		5.988.172.850		6.012.699.192		6.229.633.674		4.880.182.873		Keuangan			2.408.875.000		2.700.000.000		2.900.000.000
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	2.803.422.642	100%	5.296.111.730	100%	5.182.225.848	100%	5.233.065.661	100%	3.684.301.258	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	2.041.800.000	100%	2.412.000.000	100%	2.612.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	115.500.000	12 Bulan	144.375.000	12 Bulan	180.468.750	12 Bulan	2.255.859.375	12 Bulan	281.982.421		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	112.800.000	12 Dokumen	112.800.000	12 Dokumen	113.000.000
	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	115.500.000	12 Bulan	144.375.000	12 Bulan	180.468.750	12 Bulan	2.255.859.375	12 Bulan	281.982.421		Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	112.800.000	12 Dokumen	112.800.000	12 Dokumen	113.000.000
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Layanan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	152.995.500	12 Bulan	191.244.375	12 Bulan	273.206.250	12 Bulan	341.507.812	12 Bulan	426.884.766		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Layanan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	215.000.000	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	166.500.000
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	80.000.000			21 Paket	31.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	152.995.500	7 Orang	191.244.375	8 Orang	273.206.250	8 Orang	341.507.812	8 Orang	426.884.766		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	135.000.000	10 Orang	135.000.000	10 Orang	135.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026													USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026								
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	688.888.674	12 Bulan	854.479.442	12 Bulan	1.060.177.255	12 Bulan	1.315.754.334	12 Bulan	1.633.375.350		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	752.000.000	12 Bulan	753.200.000	12 Bulan	780.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	12 Unit	10.000.000	12 Unit	12.500.000	12 Jenis	15.625.000	12 Jenis	19.531.250	12 Jenis	24.414.063		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	10.000.000	6 Paket	15.000.000	7 Paket	20.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Unit	125.500.000	12 Unit	150.600.000	12 Jenis	180.720.000	12 Jenis	216.864.000	12 Jenis	260.236.800		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	85.000.000	10 Paket	85.000.000	11 Paket	104.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	123.779.436	12 Bulan	154.724.295	14 jenis	193.405.361	16 jenis	241.756.711	18 jenis	302.195.889		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	85.000.000	34 Paket	85.000.000	34 Paket	85.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	12 Bulan	30.748.238	12 Bulan	38.435.297	4 jenis	48.044.121	4 jenis	60.055.151	4 jenis	75.068.939		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket	40.000.000	3 Paket	40.000.000	3 Paket	40.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	365 Eksmplr	2.376.000	365 Eksmplr	2.613.600	365 Eksmplr	2.874.960	365 Eksmplr	3.162.456	365 Eksmplr	3.478.702		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	1.095 Dokumen	7.000.000	730 Dokumen	3.200.000	1.095 Dokumen	6.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	396.485.000	12 Bulan	495.606.250	60 Kali	619.507.813	65 Kali	774.384.766	70 Kali	967.980.957		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	525.000.000	110 Laporan	525.000.000	105 Laporan	525.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	5 Unit	1.025.000.000	5 Unit	3.080.000.000		2.695.000.000		-		-		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	2 Unit	70.000.000	3 Unit	495.000.000	2 Unit	605.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	150.000.000	1 Unit	300.000.000								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	425.000.000	1 Unit	527.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel kantor yang disediakan	1 Unit	25.000.000	3 Unit	280.000.000	2 unit	195.000.000						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	2 Paket	70.000.000	2 Paket	78.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 Unit	850.000.000																	
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan			1 unit	2.500.000.000	1 unit	2.500.000.000													
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	563.019.718	12 Bulan	647.239.475	12 Bulan	739.906.796	12 Bulan	850.610.644	12 Bulan	977.891.851		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	517.000.000	12 Bulan	592.000.000	12 Bulan	592.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah layananan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Bulan	4.664.000		5.130.400	12 Bulan	5.643.440	12 Bulan	6.207.784	12 Bulan	6.828.562		Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	51.667.718		59.417.875	12 Bulan	68.330.556	12 Bulan	78.580.140	12 Bulan	90.367.161		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	45.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	506.688.000		582.691.200	12 Bulan	665.932.800	12 Bulan	765.822.720	12 Bulan	880.696.128		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	470.000.000	12 Laporan	540.000.000	12 Laporan	540.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	47 Unit	258.018.750	48 Unit	378.773.438	47 Unit	233.466.797	50 Unit	469.333.496	50 Unit	364.166.870		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	51 Unit	375.000.000	51 Unit	324.000.000	52 Unit	355.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	5 Unit	129.893.750	6 Unit	162.367.188	6 Unit	202.958.984	8 Unit	253.698.730	9 Unit	317.123.413		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	11 Unit	230.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	40 Unit	13.125.000	40 Unit	16.406.250	40 Unit	20.507.813	40 Unit	25.634.766	40 Unit	32.043.457		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	40 Unit	25.000.000	40 Unit	25.000.000	40 Unit	25.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan / direhabilitasi			1 Unit	150.000.000			1 Unit	180.000.000											
	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan pemeliharaan / direhabilitasi	2 Unit	115.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Jenis	10.000.000	1 Jenis	10.000.000	1 Jenis	15.000.000		Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan pemeliharaan / direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	1 Unit	99.000.000	1 Unit	100.000.000

RENSTRA PD 2021 - 2026												USULAN PERUBAHAN RENSTRA PD 2021 - 2026									
Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		2023		Tahun 2024		2025		2026		Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	576.717.600	100%	692.061.120	100%	830.473.344	100%	996.568.013	100%	1.195.881.615		Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	367.075.000	100%	288.000.000	100%	288.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	576.717.600	12 Bulan	692.061.120	12 Bulan	830.473.344	12 Bulan	996.568.013	12 Bulan	1.195.881.615		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.524 Dokumen	367.075.000	1.524 Dokumen	288.000.000	1.524 Dokumen	288.000.000
														Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	79.075.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	216.000.000	12 bulan	259.200.000	12 bulan	311.040.000		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	1500 Dokumen SSPD	88.000.000	1500 Dokumen SSPD	88.000.000	1500 Dokumen SSPD	88.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	12 Bulan	426.717.600	12 Bulan	512.061.120	12 Bulan	614.473.344	12 bulan	737.368.013	12 bulan	884.841.615		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan dan LKjIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	83,69 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	C	B	B	B	B	B	B

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari Dokumen Perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen yang dijadikan acuan/dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara periode 2022-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2022-2026.

Pada BAB terdahulu telah diuraikan secara rinci tugas pokok dan fungsi BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga hal penting yaitu sebagai aparat pengelola, pemungut dan koordinator Pendapatan Daerah. Disamping itu telah pula diuraikan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang antara lain untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara, dan sekaligus dapat dijadikan indikator dalam mengukur dan menilai tingkat keberhasilan kinerja dan atau kegagalan BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya.

Dalam rangka mengetahui faktor-faktor yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka dirumuskan analisis lingkungan strategis berupa peluang dan ancaman yang akan dijadikan dasar dan acuan untuk merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan kebijakannya.

Selain itu, sebagai sebuah dokumen yang penting, Renstra BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya tiada lain yang diharapkan semoga Renstra ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat diharapkan menjadi nilai-nilai positif organisasi yang dapat mendorong proses pengambilan keputusan yang terencana dan sistematis serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang heterogen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat



PERUBAHAN PERTAMA
RENSTRA
Rencana Strategis
Tahun 2021 - 2026
Badan Pendapatan Daerah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA